

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN LIVELIHOOD ASSETS DI AREA RELOKASI PADA RUMAH SUSUN JATINEGARA BARAT

Fatchur Rohman¹, Winny Astuti², Paramita Rahayu³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

¹Email : fatchur2105@gmail.com

Diterima (received): 15 November 2023 Disetujui (accepted): 18 Desember 2023

ABSTRAK

Relokasi Permukiman merupakan suatu program dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan hunian layak untuk masyarakat. Kelurahan Kampung Melayu merupakan salah satu lokasi relokasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 menuju Rumah Susun Jatinegara Barat. Relokasi Permukiman memberikan dampak perubahan yang beragam dikarenakan perbedaan persepsi masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perubahan livelihood assets pada relokasi permukiman bantaran Sungai Ciliwung yang ditinjau melalui modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Metode yang digunakan menggunakan analisis skoring dan deskriptif kuantitatif melalui kuesioner dan wawancara terbuka kepada masyarakat Rumah Susun Jatinegara Barat yang terdampak relokasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat terelokasi ke Rumah Susun Jatinegara Barat mengalami perubahan positif menuju livelihood assets dengan skor keseluruhannya sebesar 70,99%.

Kata Kunci : Relokasi; Livelihood Assets; Persepsi Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi bahwa pada tahun 2030 terdapat 3 dari 5 orang bertempat tinggal di kawasan perkotaan (Baiquni, 2002). Masyarakat perkotaan terdiri dari berbagai lapisan sosial yang didalamnya terdapat kelas sosial, status sosial, dan stratifikasi sosial sebagai respon terhadap urbanisasi yang menjadi pemicu keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pembentukan permukiman (Jamaludin, 2015). Salah satu kota yang paling terdampak di Indonesia adalah DKI Jakarta, kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 10.679.951 (BPS, 2022). Permukiman kumuh terdapat di berbagai sisi Kota Jakarta yang dipublikasikan oleh BPS DKI Jakarta pada tahun 2017 menurut pendataan BPS (2013) dan Kotaku (2016) meliputi 244 RW, salah satunya berada pada bantaran Sungai Ciliwung sudah ada sejak 40 hingga 50 tahun yang lalu yang dibangun oleh para pendatang dengan keterbatasan finansial dalam mencari tempat tinggal di luar wilayah sungai (Wati, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan Resettlement

Policy Framework (RPF) atau Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) yaitu relokasi tempat tinggal, normalisasi alur Sungai Ciliwung, serta pengaturan dan pemulihan kawasan permukiman (Chien, 2017). Relokasi permukiman di Kelurahan Kampung Melayu salah satunya tertuju di Rumah Susun Jatinegara Barat yang telah terelokasi dari sepenuhnya pada tahun 2015 yang sejalan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP) untuk menjawab tantangan penanganan kawasan kumuh di Indonesia. Hal ini merupakan respon langsung terhadap RPJMN 2015-2019 pada saat itu dan juga sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang mengamanahkan penyelesaian pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di 10000 ha dengan mempertahankan prinsip-prinsip yang mengedepankan upaya memperkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat.

Dampak perubahan pada kawasan yang berubah menciptakan beragam pandangan di kalangan warga sekitar yang terkena dampak adanya program penanganan permukiman bantaran sungai (Zahrah dkk., 2020). Perubahan ini memiliki efek psikologis yang berbeda-beda pada individu, dengan tingkat adaptasi yang tinggi memungkinkan mereka untuk bertahan dalam situasi tersebut hingga saat ini (Fanggidae dkk., 2019).

Penelitian-penelitian yang lebih dahulu terkait dengan relokasi permukiman antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ayu Widyastuti tahun 2017 dengan judul “Analisis Dampak Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Terhadap Masyarakat Kampung Pulo di DKI Jakarta” yang menyimpulkan bahwa normalisasi dan relokasi di Jakarta dapat mengurangi banjir dan meningkatkan nilai masyarakat yang direlokasi ke Rusun dari lima aspek *sustainable livelihood*. Peningkatan nilai terjadi pada *human capital*, *social capital*, *natural capital*, dan *physical capital*, dengan penurunan pada *financial capital*. Penelitian lainnya dari Muhammad Ainurroffio tahun 2018 dengan judul “Dampak Program Relokasi Wilayah Kumuh Masyarakat Kampung Pulo ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat Jakarta Timur” yang menyimpulkan bahwa efek relokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat dirasakan oleh masyarakat yang kehilangan hunian mereka, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan hunian layak serta program lanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi bagi penghuni Rusunawa. Selain itu penelitian lain dari Fitrianti dan Fadhilah tahun 2018 adalah “Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta” yang menyimpulkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Rumah Susun dapat berdampak pada fungsi Sungai Ciliwung dan risiko banjir yang berkurang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang perubahan *livelihood assets* pada relokasi permukiman bantaran Sungai Ciliwung yang ditinjau melalui modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai perubahan *livelihood assets* pada relokasi permukiman bantaran Sungai Ciliwung yang ditinjau melalui modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial.

B. METODE PENELITIAN

1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat yang terdampak relokasi permukiman dari bantaran Sungai Ciliwung di Kelurahan Kampung Melayu yang meliputi modal manusia, modal lingkungan, modal fisik, modal sosial, dan modal finansial. Kemudian terdapat data pendukung yang didapatkan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta berupa persebaran infrastruktur di DKI Jakarta dan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I berupa data program pasca relokasi.

Dalam kelima modal tersebut dijabarkan Kembali data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kajian literatur dan kondisi lapangan penelitian. Modal manusia meliputi pendidikan, keahlian, dan kesehatan. Modal Lingkungan meliputi kualitas air, pengolahan air limbah, ruang terbuka, kualitas udara, dan pengelolaan persampahan. Modal fisik berupa transportasi dan infrastruktur mitigasi bencana. Modal sosial berupa hubungan dan organisasi sosial. Modal finansial berupa pendapatan, pengeluaran, dan akses kredit.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan jenis penelitiannya kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memperjelas suatu masalah yang akan diteliti, sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis, dan sebagai referensi dalam penyusunan variabel penelitian. Karena hal tersebut dalam penelitian kuantitatif diperlukan skala pengukuran untuk menghasilkan data yang akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui kuesioner, wawancara dan observasi lapangan secara langsung serta data pendukungnya melalui data sekunder yang didapatkan melalui survei ke lembaga terkait dan eksplorasi studi literatur (Sugiyono, 2013).

Responden penelitian merupakan masyarakat yang tinggal di Rumah Susun Jatinegara Barat yang terdampak akibat relokasi permukiman bantaran Sungai ciliwung pada tahun 2015 dengan jumlah responden 34. Teknik analisis data yang digunakan berupa *skoring likert* dan analisis deskriptif kuantitatif.

a. Skoring Likert

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan studi literatur berjudul “Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah” yang disusun Muhammad Helmi Setiawan.

- Tahap pertama, membuat skor pada tiap pilihan yang diajukan didasarkan pada persepsi seseorang dari kondisi sangat buruk hingga sangat baik. Persepsi tersebut memiliki skor berbentuk ordinal untuk digunakan dalam tahapan akhir.

Tabel 1. Nilai Skor Pilihan

Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono, 2013

- Tahap kedua, mencari total skor dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Total Skor} = T \times \text{PN}$$
 Keterangan:
 T : Jumlah Responden
 PN : Pilihan Angka Skala Likert
 (Setiawan, 2020)
- Tahap ketiga, setelah mendapatkan total skor pada rumus sebelumnya kemudian menghitung penilaian interpretasinya dengan menggunakan rumus index (%).

$$\text{Rumus Indeks (\%)} = \text{Total Skor} / Y \times 100$$
 Keterangan:
 Y: Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden
 (Setiawan, 2020)
- Tahap keempat, untuk mengetahui interval dan interpretasi persen.

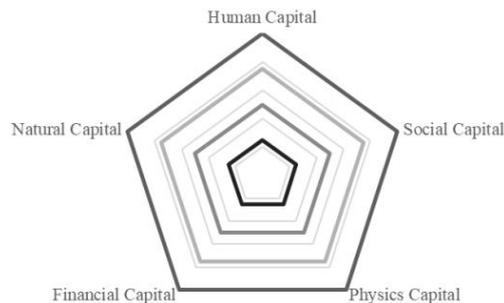
$$I = 100 / 5 \text{ interval (likert)}$$
 Maka didapatkan hasil 20 untuk setiap intervalnya. Berikut tabel kriteria dan interpretasinya.

Tabel 2. Nilai Skor Pilihan

Kriteria Interpretasi Skor	Indeks Interval
Sangat Baik	>80%
Baik	60 – 80%
Netral	40- 60%
Buruk	20 – 40%
Sangat Buruk	<20%

Sumber: Setiawan, 2020

- Tahap kelima, hasil dari interpretasi tersebut kemudian di input ke dalam diagram *pentagonal assets*.



Gambar 1. Diagram *Pentagonal Assets*

Sumber: DFID, 2001

b. Deskriptif Kuantitatif

Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan grafik, tabel/matriks, laporan dan angka yang dapat diukur. Teknik ini nantinya akan mengkonfirmasi suatu teori penelitian antara dampak normalisasi dengan permukiman kumuh yang menggunakan *pentagonal assets*. Luaran dari analisis ini akan mengedepankan suatu fakta pada studi penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

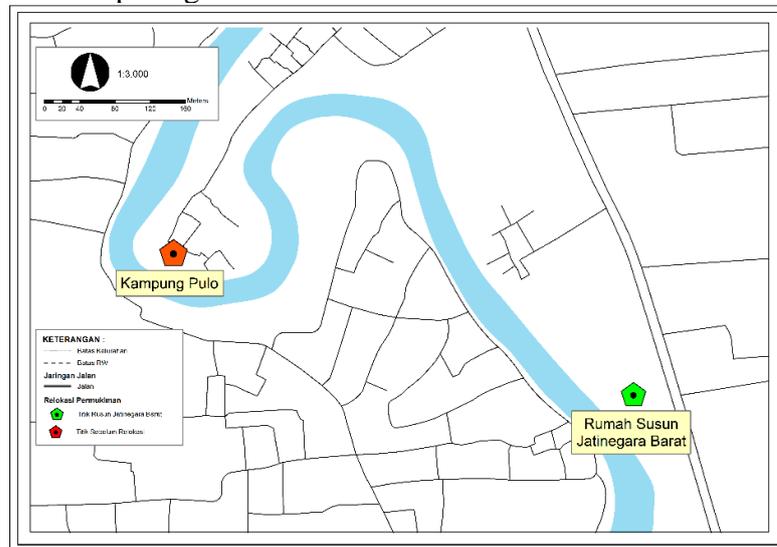
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Susun Jatinegara Barat adalah proyek perumahan sewa di Jatinegara Barat, dirancang khusus untuk masyarakat yang telah direlokasi dari Kampung Pulo pada tahun 2015. Dengan total luas $14,920 m^2$ di bawah pengelolaan UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) 1, rumah susun ini dibangun menggunakan dana APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdiri dari 2 tower dengan 16 lantai, menyediakan 520 unit, dan dilengkapi dengan 4 lift orang dan 1 lift barang.

Proses penempatan hunian menggunakan sistem undian, dengan prioritas untuk lansia yang ditempatkan di lantai bawah. Fasilitas di Rumah Susun Jatinegara Barat meliputi alat pengangkut sampah, ATM Bank DKI, bus sekolah, klinik kesehatan, UMKM, masjid, PAUD, perpustakaan, TPS, IPAL, dan alat pemadam kebakaran di setiap lantainya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program pasca relokasi, mencakup pelatihan tata boga, otomotif roda dua, operator komputer, tata rias, las, teknisi pendingin (AC/Kulkas), pengemasan produk, pangan murah, kartu rusun, dan penyediaan lapak UMKM.

Lokasi sebelum dan sesudah relokasi permukiman ke Rumah Susun Jatinegara Barat dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Peta Wilayah Studi Relokasi Permukiman Bantaran Sungai Ciliwung
Sumber: Peneliti, 2023

2. Modal Manusia

Variabel penelitian yang digunakan dalam penilaian modal manusia meliputi pendidikan, keterampilan, dan kesehatan dengan menggunakan 6 pernyataan untuk menjawab dampak perubahan pada modal manusia.

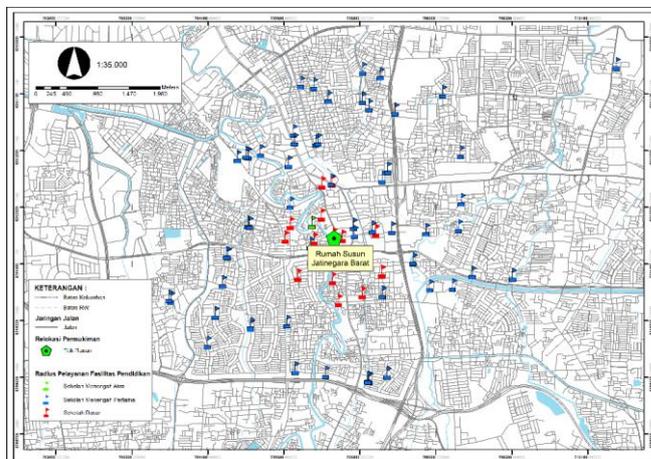
Fatchur Rohman, Winny Astuti dan Paramita Rahayu, Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Livelihood Assets Di Area Relokasi Pada Rumah Susun Jatinegara Barat

Tabel 3. Persentase Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Modal Manusia

No.	Modal Manusia		Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)
Variabel	Pernyataan						
1	Pendidikan	Relokasi membuat jarak terhadap fasilitas pendidikan lebih dekat.	0,00%	0,00%	8,82%	47,06%	44,12%
2	Keahlian dan Pekerjaan	Relokasi menyebabkan pekerjaan saya bertambah maju.	0,00%	8,82%	82,35%	8,82%	0,00%
3		Keahlian saya meningkat setelah mendapatkan program pelatihan.	0,00%	0,00%	29,41%	38,24%	32,35%
4	Kesehatan	Relokasi membuat jarak terhadap fasilitas kesehatan lebih dekat.	0,00%	17,65%	52,94%	26,47%	2,94%
5		Relokasi telah memberikan lebih banyak pilihan fasilitas kesehatan bagi saya.	0,00%	14,71%	61,76%	23,53%	0,00%
6		Kualitas fasilitas kesehatan meningkat setelah relokasi.	0,00%	11,76%	52,94%	35,29%	0,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner perubahan jarak terhadap fasilitas pendidikan masyarakat mempersepsikan perubahan lebih dekat sebesar 47,06% setuju dan 44,12% sangat setuju hal tersebut. Fasilitas pendidikan memiliki radius pelayanan berbeda-beda berdasarkan pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama memiliki radius pelayanan sejauh 1000 meter sedangkan sekolah menengah atas memiliki radius pelayanan 3000 meter yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 3. Peta Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Rumah Susun Jatinegara Barat

Sumber: peneliti, 2023

Selain itu, perubahan dalam keahlian dan pekerjaan juga menjadi perhatian. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (82,35%) tidak merasakan perubahan setelah relokasi, meskipun sebagian setuju (38,24%) dan sangat setuju (32,35%) bahwa pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait meningkatkan keahlian masyarakat Rumah Susun Jatinegara Barat. Kemudian terdapat persepsi masyarakat terhadap kesehatan. 52,94% tidak merasakan perubahan terhadap akses mereka ke fasilitas kesehatan, 61,76% tidak terdapat perubahan dalam lebih banyak pilihan fasilitas kesehatan, dan 52,94% tidak terdapat perubahan terhadap kualitas fasilitas kesehatan.

Penelitian Adriani (2019) menyoroti korelasi antara pendidikan tinggi dan peningkatan pendapatan, yang menekankan hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Namun, sebuah studi pasca relokasi selama 8 tahun di Rumah Susun Jatinegara Barat tidak menunjukkan adanya peningkatan pendapatan atau tabungan masyarakat. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan hard skill melalui program-program lanjutan hanya berdampak sebagian pada pendapatan, sehingga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih langsung dan partisipatif. Strategi pemerintah yang bernuansa harus menggali lebih dalam untuk memahami kebutuhan masyarakat, memastikan program-program yang berdampak, dan mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menentukan akses pekerjaan dan mempengaruhi sumber daya keuangan (Farrington dkk., 2002). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun, yang didukung oleh bantuan keuangan melalui program KJP dan BPMS, serta bantuan keuangan untuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Berinvestasi pada modal manusia membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil yang nyata, berbeda dengan modal fisik yang memberikan manfaat yang lebih cepat dan mudah diukur (World Bank, 2018).

3. Modal Lingkungan

Variabel penelitian yang digunakan dalam penilaian modal lingkungan meliputi kualitas air, pengolahan air limbah, ruang terbuka, dan persampahan dengan menggunakan 5 pernyataan untuk menjawab dampak perubahan pada modal lingkungan.

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 50,00% responden setuju dan 47,06% sangat setuju bahwa terjadi perubahan positif dalam kualitas air bersih di Rumah Susun Jatinegara Barat. Pengolahan air limbah juga mendapat tanggapan positif, dimana 55,88% responden setuju bahwa perubahan ini akan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar melalui IPAL komunal di kompleks tersebut. Terkait relokasi ke ruang terbuka, sebanyak 52,94% responden setuju bahwa jarak lebih dekat dengan taman dan/atau lapangan di Rumah Susun Jatinegara Barat. Selain itu, dalam pengelolaan persampahan, sebanyak 55,88% responden setuju bahwa terjadi perubahan positif, termasuk adopsi kebiasaan baru dalam pembuangan sampah yang lebih baik sebesar 50,00%.

Tabel 4. Persentase Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Modal Lingkungan

No.	Modal Lingkungan		Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)
	Variabel	Pernyataan					
1	Kualitas Air Bersih	Relokasi membuat masyarakat mendapatkan air bersih yang lebih baik.	0,00%	0,00%	2,94%	50,00%	47,06%
2	Pengolahan Air Limbah	Intalasi pengolahan air limbah (IPAL) penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan	0,00%	0,00%	14,71%	55,88%	29,41%
3	Ruang Terbuka	Relokasi membuat jarak ke taman dan lapangan lebih dekat.	0,00%	2,94%	44,12%	52,94%	0,00%
4		Pengelolaan persampahan di area relokasi menjadi lebih baik	0,00%	0,00%	14,71%	55,88%	29,41%
5	Persampahan	Tempat tinggal baru membangun kebiasaan baru untuk persampahan	0,00%	0,00%	8,82%	50,00%	41,18%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Modal lingkungan mencakup aset dan layanan ekologi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menilai peran alam dalam menopang kehidupan. Meskipun ketersediaannya terbatas bagi MBR di perkotaan, modal lingkungan tetap penting. Setiap hari, MBR bergantung pada modal lingkungan, terutama untuk sanitasi dan air minum (Farrington dkk., 2002). Aktivitas manusia, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, mempengaruhi fluktuasi modal lingkungan, termasuk konsumsi sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Studi ini berfokus pada kualitas air, pengolahan air limbah, ruang terbuka, dan pengelolaan sampah. Kualitas lingkungan yang buruk, yang meliputi udara, air, tanah, area hijau, dan penggunaan sumber daya, berdampak buruk pada kesehatan manusia. Perubahan positif pasca relokasi, seperti fasilitas pengolahan air limbah, peningkatan pengelolaan sampah, dan pemanfaatan ruang terbuka oleh masyarakat, mencerminkan peningkatan kelestarian lingkungan.

4. Modal Fisik

Variabel penelitian yang digunakan dalam penilaian modal fisik meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur mitigasi bencana dengan menggunakan 5 pernyataan untuk menjawab dampak perubahan pada modal fisik.

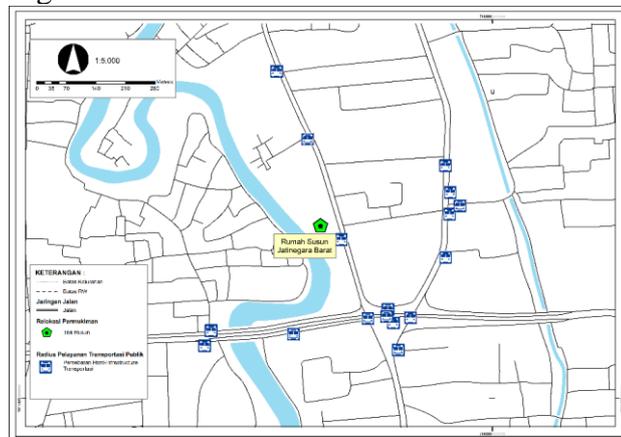
Tabel 5. Persentase Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Modal Fisik

Fatchur Rohman, Winny Astuti dan Paramita Rahayu, Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Livelihood Assets Di Area Relokasi Pada Rumah Susun Jatinegara Barat

No.	Modal Fisik		Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)
Variabel	Pernyataan						
1		Akses ke transportasi publik meningkat setelah relokasi.	0,00%	0,00%	5,88%	50,00%	44,12%
2	Infrastruktur Transportasi	Relokasi telah membuat pilihan lebih banyak pilihan rute angkutan umum.	0,00%	0,00%	2,94%	44,12%	52,94%
3		Relokasi membuat jalan menuju hunian lebih mudah dan baik.	0,00%	0,00%	5,88%	55,88%	38,24%
4	Infrastruktur Mitigasi Bencana	Infrastruktur mitigasi bencana yang disediakan saat relokasi telah membantu dalam mengurangi risiko bencana. Terdapat sistem peringatan dini bencana di area relokasi yang informatif dan tepat waktu.	0,00%	0,00%	11,77%	52,94%	35,29%
5			0,00%	0,00%	14,71%	50,00%	35,29%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner perubahan infrastruktur transportasi mempersepsikan terdapat perubahan kearah lebih baik sebesar 50,00% setuju dan 44,12% sangat setuju pada peningkatan aksesibilitasnya terhadap transportasi publik, 44,12% setuju dan 52,94% sangat setuju pada lebih banyaknya pilihan rute transportasi publik, dan 55,88% setuju dan 38,24% sangat setuju pada akses jalan menuju hunian yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan mengenai jarak ideal pejalan kaki untuk transit ke titik lainnya dibuktikan dengan gambar 4 berikut.



Gambar 4. Peta Radius Pelayanan Transportasi Publik di Rumah Susun Jatinegara Barat Sumber: peneliti, 2023

Selanjutnya dalam infrastruktur mitigasi bencana mempersepsikan terdapat perubahan kearah lebih baik pada peningkatan infrastruktur mitigasi bencana telah membantu dalam mengurangi risiko bencana sebesar 52,94% setuju serta sistem peringatan dini bencana sebesar 50,00%. Hal tersebut menjadikan relokasi permukiman menjadi lebih aman dari bencana alam dibandingkan lokasi sebelumnya masyarakat selalu waspada akan terjadi bencana seperti banjir karena letaknya yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan kebakaran karena permukiman padat penduduk.

Modal fisik terdiri dari infrastruktur dan fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Prihandini, 2017). Bagi masyarakat miskin perkotaan, pendekatan partisipatif sangat penting untuk memprioritaskan akses infrastruktur yang selaras dengan tujuan mata pencaharian (DFID, 2001). Perumahan sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan, yang menawarkan tempat tinggal dan potensi produktivitas (Farrington dkk., 2002). Kepemilikan rumah, sebagai aset fisik utama, mengurangi kerentanan terhadap bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Masyarakat yang direlokasi mengalami penurunan kepemilikan rumah karena adanya tambahan biaya bulanan. Meskipun demikian, beberapa masyarakat beradaptasi secara positif, melihat relokasi sebagai pengurangan risiko dan peningkatan akses ke fasilitas dasar. Pengembangan sistem transportasi di Jakarta selama 2015-2023, khususnya integrasi Jak Lingko, berdampak positif terhadap mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Modal Sosial

Variabel penelitian yang digunakan dalam penilaian modal sosial meliputi hubungan dan organisasi sosial dengan menggunakan 6 pernyataan untuk menjawab dampak perubahan pada modal sosial.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner perubahan hubungan sosial dan organisasi sosial mempersepsikan tidak terdapat perubahan baik itu lebih baik atau lebih buruk. Dalam hubungan dengan tetangga masyarakat mempersepsikan 55,58% kondisinya sama seperti sebelum terjadi relokasi, kepedulian sosial 55,58% kondisinya sama seperti sebelum terjadi relokasi, dan Kerjasama antar warga 64,71% kondisinya sama seperti sebelum terjadi relokasi. Meskipun gotong royong berkurang karena adanya petugas kebersihan, kolaborasi dalam kegiatan sosial tetap kuat.

Selanjutnya dalam organisasi sosial, relokasi membawa perubahan positif dalam sistem organisasi komunitasnya sebesar 47,06% netral dan 35,29% setuju, motivasi masyarakat untuk dapat terlibat lebih dalam kegiatan komunitas terdapat perubahan kearah lebih baik sebesar 52,94% netral dan 32,94% setuju, dan kesempatan baru dalam berpartisipasi kegiatan komunitas juga membawa perubahan kearah lebih baik sebesar 44,12% netral dan 35,29% setuju.

Relokasi menciptakan perubahan dalam struktur komunitas, di mana kader-kader di bawah RW diharuskan menjalankan berbagai kegiatan komunitas. UPRS, sebagai Unit Pengelola Rumah Susun, berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengelola rumah susun dan menjaga kebersihan, estetika, serta keamanan lingkungan. Studi kasus dengan lokasi yang sama menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pada Rumah Susun Jatinegara Barat, perubahan terutama terkait dengan pembentukan RW dan RT baru, tanpa dampak signifikan pada organisasi sosial

dalam dua tahun setelah relokasi. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, terlihat perubahan positif dalam motivasi masyarakat dan kesempatan baru untuk terlibat dalam kegiatan komunitas.

Tabel 6. Persentase Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Modal Sosial

No.	Modal Sosial	Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)	
Variabel	Pernyataan						
1	Hubungan Sosial	Relokasi membuat hubungan saya dengan tetangga lebih dekat.	0,00%	14,71%	55,88%	23,53%	5,88%
2		Relokasi permukiman telah meningkatkan rasa kepedulian sosial.	2,94%	17,65%	55,88%	23,53%	0,00%
3		Relokasi permukiman telah memperkuat kerjasama antarwarga dalam upaya menjaga lingkungan yang baru.	0,00%	11,76%	64,71%	20,59%	2,94%
4	Organisasi Sosial	Saya merasa bahwa relokasi ke rusun membuat perubahan positif dalam sistem organisasi komunitas.	0,00%	17,65%	47,06%	35,29%	0,00%
5		Saya merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan komunitas setelah kami direlokasi.	0,00%	11,76%	52,94%	35,29%	0,00%
6		Relokasi telah memberi saya kesempatan baru untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas.	0,00%	11,76%	44,12%	35,29%	8,82%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Modal sosial mengacu pada sumber daya tak berwujud yang berasal dari individu atau kelompok melalui jaringan dan hubungan sosial (Mitra, 2008). Membangun modal sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melibatkan penguatan institusi lokal secara langsung (peningkatan kapasitas, pelatihan kepemimpinan, atau suntikan dana) dan secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis untuk pertumbuhan institusi (DFID, 2001). Studi ini mempertimbangkan hubungan sosial dan organisasi dalam kehidupan masyarakat yang direlokasi. Modal sosial, sumber daya yang terus berkembang dan terakumulasi, berbeda dengan bentuk modal lainnya (Fathy, 2019). Meskipun relokasi pada awalnya mengganggu hubungan sosial di lingkungan sekitar, adaptasi yang konsisten terjadi selama 2015-2023, yang menekankan peran penting modal sosial bagi rumah tangga miskin perkotaan, terutama selama krisis.

6. Modal Finansial

Variabel penelitian yang digunakan dalam penilaian modal finansial meliputi pendapatan, pengeluaran, dan akses kredit masyarakat dengan menggunakan 6 pernyataan untuk menjawab dampak perubahan pada modal finansial.

Tabel 7. Persentase Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Modal Finansial

No.	Modal Finansial		Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Netral (%)	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)
	Variabel	Pernyataan					
1	Pendapatan	Relokasi permukiman telah meningkatkan pendapatan secara signifikan	0,00%	47,06%	29,41%	23,53%	0,00%
2	Pengeluaran	Kewajiban membayar biaya fasilitas-fasilitas tidak mengurangi kemampuan saya.	0,00%	35,29%	50,00%	14,71%	0,00%
3	Akses Kredit	Relokasi meningkatkan kemampuan saya untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.	14,71%	76,47%	8,82%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner perubahan pendapatan mempersepsikan terdapat perubahan yang lebih buruk jika dibandingkan dengan sebelum adanya relokasi sebesar 47,06%. Namun dengan jumlah unit sebesar 520 hunian di Rumah Susun Jatinegara Barat masyarakat masih memiliki peluang untuk mengembangkan perekonomian lokalnya melalui lapak UMKM yang sudah disediakan pada lantai 1 dan lantai dasar. Kemudian kemampuan dalam kewajiban membayar fasilitas terdapat perbedaan di masyarakat, 35,29% tidak setuju bahwa tidak mengurangi kemampuannya dan 50,00% netral yang dimana pada saat sebelum relokasi terjadi mereka tinggal tanpa membayar biaya sewa unit namun saat ini mereka diwajibkan membayar beserta fasilitas-fasilitasnya. Akses kredit masyarakat saat ini ke bank atau Lembaga keuangan lainnya mengalami penurunan atau terjadi perubahan yang lebih buruk jika dibandingkan sebelumnya, sebesar 76,47% masyarakat setuju dengan anggapan tersebut dikarenakan Rumah Susun Jatinegara Barat merupakan bentuk RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) sehingga tidak dapat jaminan yang dapat diajukan.

Memprioritaskan pengembangan aset keuangan sangat penting bagi masyarakat miskin perkotaan untuk mengamankan mata pencaharian. Aset keuangan, yang bersifat fleksibel dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya, secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat miskin perkotaan sering kali menghadapi sistem keuangan yang rumit dan terjerat utang (Sanderson, 2000). Program berkelanjutan pemerintah provinsi Jakarta membantu warga yang direlokasi, dengan fokus pada pelatihan, penyediaan kartu Rusun untuk akses pangan yang terjangkau, dan transportasi gratis. Modal finansial, yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, menyoroiti pentingnya aset-aset lain seperti pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(DFID, 2001). Urbanisasi meningkatkan kebutuhan akan pendapatan tunai, tetapi tantangan seperti kasta atau agama dapat mengaburkan peluang (Benjamin dan Amis, 1999). Di Indonesia, meskipun masyarakat miskin di perkotaan bergantung pada pendapatan tunai, mereka masih memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat miskin di pedesaan.

7. Pentagonal Assets

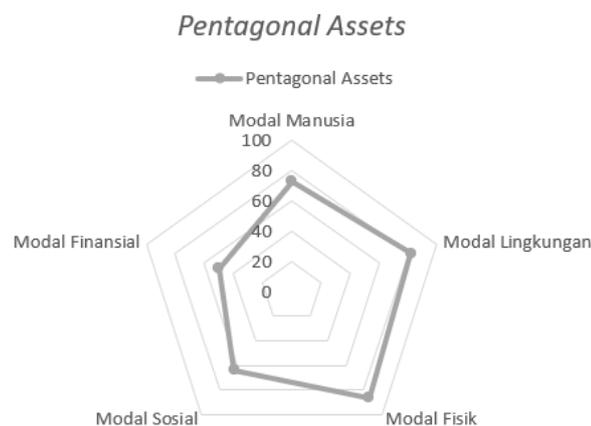
Dalam membuat *pentagonal assets* digunakan skoring skala likert yang memungkinkan variabel terukur sebagai indikator variabel. Indikator berfungsi sebagai titik awal untuk membuat item instrumen berupa pernyataan (Sugiyono, 2013). Terdapat beberapa pernyataan yang diajukan untuk menilai suatu perubahan pada kelima modal yang digunakan berjumlah 25 pernyataan terdiri dari modal manusia dengan 6 pernyataan, modal lingkungan dengan 5 pernyataan, modal fisik dengan 5 pernyataan, modal sosial dengan 6 pernyataan, dan modal finansial dengan 3 pernyataan.

Selanjutnya dilakukan penjumlahan dan mencari mean skoring setiap modalnya dan dilakukan interpretasi skor berdasarkan hasil lapangan. Skoring dan interpretasinya dapat dilihat pada tabel 4.31 dan gambar 4.22 berikut yang dijabarkan melalui diagram *pentagonal assets*.

Tabel 8. Hasil Skoring Perubahan Livelihood Assets

No.	Livelihood Assets	Relokasi Permukiman	
		Skoring	Interpretasi
1	Modal Manusia	72,55%	Perubahan Baik
2	Modal Lingkungan	82,12%	Perubahan Sangat Baik
3	Modal Fisik	86,37%	Perubahan Sangat Baik
4	Modal Sosial	63,93%	Perubahan Baik
5	Modal Finansial	50,00%	Tidak Terjadi Perubahan
	Rata-Rata	70,99%	Perubahan Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 5. Hasil Temuan Diagram *Pentagonal Assets*

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berdasarkan persepsi masyarakat, perubahan *livelihood assets* tampaknya lebih signifikan pada modal lingkungan dan modal fisik dimana dampaknya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat berbeda dengan modal manusia, modal sosial, dan modal finansial dimana dampaknya dapat dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat yang terelokasi dan membutuhkan waktu.

D. KESIMPULAN

Perubahan *livelihood assets* pada lokasi relokasi permukiman kumuh Bantaran Sungai Ciliwung ke Rumah Susun Jatinegara Barat pada tahun 2015 dapat dilihat berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kelima modal. Pada modal fisik dan modal lingkungan hasil penelitian menunjukkan perubahan positif dalam keseluruhan variabelnya. Modal manusia perlu fokus pada pelatihan yang dibutuhkan agar hasilnya sesuai harapan dan dapat meningkatkan pendapatan. Modal sosial yang mencakup sumber daya tak berwujud melalui jaringan dan hubungan sosial, memerlukan adaptasi waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil optimal. Sementara modal finansial hasil menunjukkan penurunan pendapatan dan akses kredit yang telah hilang, mengindikasikan kebutuhan akan lembaga simpan pinjam di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir terkait keberlanjutan kehidupan masyarakat sebesar 70,99% atau menunjukkan perubahan ke sisi baik. Apabila proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat terus berlanjut dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membuat program-program yang mendukung pengembangan *softskill* dan *hardskill*, bukan hal yang mustahil jika nantinya masyarakat terelokasi permukiman Bantaran Sungai Ciliwung akan dapat berkelanjutan atau memiliki perekonomian stabil dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Ainurrofiq, M. (2018). Dampak Program Relokasi Wilayah Kumuh Masyarakat Kampung Pulo Ke Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat Jakarta Timur.
- Asyah, A. N. (2014). Penentuan Kriteria Permukiman Berdasarkan Preferensi Masyarakat Permukiman Kumuh di Sepanjang Sungai Ciliwung (Studi Kasus: Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan).
- Baiquni. (2002). *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia (Unsustainable Development: A Critical Reflection)* Yogyakarta: Trans Media.
- Benjamin, S., & Amis, P. (1999). *Urban governance, partnership and poverty in Bangalore*.
- BPS. (2017). *Pendataan RW Kumuh 2017 Provinsi DKI Jakarta*
- BPS. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022*. BPS DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlahpendudukmenurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>

- Chien, S. R. (2017). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permasalahan Relokasi Bantaran Sungai. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(2), 488–499. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/1470/947>
- DFID. (2001). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*.
- Fanggidae, L. W., Yoyok Wahyu Subroto, T., & Nareswari, A. (2019). The persistence of the traditional house's spatial system in the migrant street vendor's stalls. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 586–594.
- Farrington, J., Ramasut, T., & Walker, J. (2002). *Sustainable Livelihood Approaches in Urban Areas : General Lessons , with Illustrations from Indian Cases*. Overseas Development Institute, 162, 1.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Fitrianti, N. A., & Fadhilah, N. L. (2018). Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta. *Lentera Hukum*, 5(2), 277. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.6788>
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. *Sosiologi Perkotaan*, 2(2), 59–80.
- Mitra, A. (2008). Social capital, livelihood and upward mobility. *Habitat International*, 32(2), 261–269. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2007.08.006>
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Prihandini, N. (2017). Identifikasi Modal (Sosial, Alam, Finansial, Fisik Dan Manusia) Pada Dusun Wisata Sade Di Kabupaten Lombok Tengah *Jurnal Ilmiah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1), 1–7.
- Sanderson, D. (2000). Cities, disasters and livelihoods. *Environment and Urbanization*, 12(2), 93–102. <https://doi.org/10.1177/095624780001200208>
- Setiawan, M. (2020). Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta Bandung.
- Wati, A. (2018). Keterikatan Tempat Bermukim Pada Permukiman Kumuh Di Manggarai, Jakarta-Selatan. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.35760/dk.2018.v17i1.1921>
- Widyastuti, S. A. (2017). Analisis Dampak Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Terhadap Masyarakat Kampung Pulo di Dki Jakarta.
- World Bank (2018). Investasi untuk Kembangkan Modal Manusia. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/in/news/immersive-story/2018/08/03/investing-in-people-to-build-human-capital>.
- Zahrah, W., Loebis, M. N., Ginting, N., & Aulia, D. N. (2020). Community perception and adaptation about living in shop house in Medan, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012020>.